

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar di Indonesia banyak perbedaan terhadap apa yang ingin diberikannya kepada pasangannya. Mahar itu bisa dibayar dengan emas, jasa, alat shalat serta yang lainnya.

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan,¹ mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.²

Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri.³ Akan tetapi, suami

¹ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, hal. 237

² Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015, hal.

³ *Ibid*, hal. 203

dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima mahar.⁴ Suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadaan wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri.⁵

Hal ini sebagaimana firman Allah swt :

وَهُنَّ يَاهُتَدُصْنَ لَنَ فَنَّا لَبَطَهْ كُنْغُفَنَّهُمْ شَاسَ فُ هُكْ أَتْنَهْ أَتْرَهْمَ
 ٥ اَوْتَاوْ لَاهِنَنَّ سَاءَ

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa': 4).⁶

Istilah mahar juga terdapat dalam hadits Nabi saw agar memberikan mahar kepada calon istri :

⁴ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 239

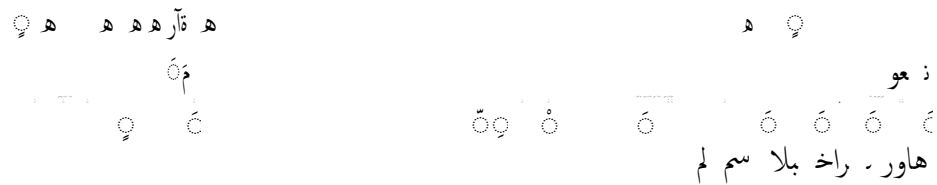
⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 78

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



Artinya : Daripada Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata: Rasulullah saw pernah mengahwinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat daripada besi. (HR Bukhari Muslim).⁷

Hadits diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. hal ini menunjukkan kewajiban mahar menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya.

Walaupun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan.⁸ Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami

⁷ Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010, hal. 322

⁸ Asep Sobari, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012, hal. 667

dan tidak pula mengesankan apa adanya, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelekan.⁹

Dalam hukum Islam tidak ada yang menyatakan bahwa mahar harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menuntut mahar yang mahal. Jika mahar berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta dan kasih sayang.

Pada umumnya mahar haruslah berbentuk materi, baik, uang atau barang berharga, emas, perak, jasa ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing.¹⁰ Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah swt seperti khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, udara, yang tidak bisa dimilikinya.¹¹

Adapun mahar yang sebaiknya dalam bentuk barang tercantum dalam sabda Nabi saw :

202 ⁹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal.

¹⁰ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 48

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 81

Mahar sebagai hak wanita yang harus dipenuhi bukan hak wali dari perempuan, sehingga ayahnya atau siapapun tidak boleh mengambil sedikitpun mahar tersebut, walaupun mahar tersebut mempunyai nilai materi sangat kecil, akan tetapi mahar itu harus tetap dibayarkan. Selama mahar itu belum diberikan, selama itu pula mahar menjadi tanggungan calon suami.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Namun dalam syari'at Islam memungkinkan penangguhan pelaksanaan membayar mahar baik itu seluruhnya atau sebagian, maka status mahar yang dalam status hutang pembayarannya menjadi hutang mempelai suami.

Pembayaran mahar adalah karena adanya hubungan persetubuhan atau persenggamaan yang terjadi antara pihak suami istrinya, maka jatuhlah kewajiban memberi mahar karena imbalannya telah terlaksana. Suami telah

¹² Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010, hal. 433



boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan yang lainnya mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian dimuka manakala akan menggauli istri. Ada juga yang membolehkan karena perceraian ini dikemukakan pendapat al-Auza'i. Perbedaan tersebut karena pernikahan disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Menurut Sayyid al-Hakim bahwa jika ia menunda mahar, maka ia wajib menentukan waktunya meskipun secara global, umpamanya datang seorang musafir, atau datangnya kelahiran.¹⁶

Ketika mahar berbentuk barang haruslah diketahui bentuk dan sifat, barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan, mahar itu juga harus memenuhi syarat untuk diperjual-belikan dan diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan.

Mahar diwajibkan kepada calon suami, karena hal tersebut sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki.

¹⁶ Tihami dkk, *Fikih Munakahat Lengkap Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 44

Ketika mahar berbentuk barang haruslah diketahui bentuk dan sifat, barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan, mahar itu juga harus memenuhi syarat untuk diperjual-belikan dan diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan.

Mahar diwajibkan kepada calon suami, karena hal tersebut sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki.

Allah SWT. Berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :



Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Karena itu Islam menyerahkan masalah kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah)

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 58

mahar masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Sehingga segala nash yang memberikan ketentuan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 bahwa penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau ditangguhnya, diucapkan pada saat akad nikah. Pada saat ijab oleh wali mempelai wanita, dan dikonfirmasi dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal ini tampaknya lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan, yang menjadi masalah yaitu bagaimana jika pasal 31 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif fikih.

Para ulama sepakat (Ibnu Rusyd, 1989:15) bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Hanafi mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu jumlah minimalnya emas atau perak seberat 10 dirham. Kalau suatu akad dilakukan

dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, tetapi wajib membayar mahar 10 dirham¹⁸. Dengan berdasarkan Hadits :¹⁹

لَا قَوْلَ لَوْ سَرَّ اللَّهُ لَهُ صَ اللَّهُ هِيَ لَمَعَ وَ لَمْ سَ : حَنِيلَ عَاسَنَلَا لَا كَلَاءَاءَ، وَ لَ نَجُوزِي
لَ يَاءَ، وَ لَ نَ يَ يَرْمَهُ مَارِيَّةَ شَع [زَيَّ بَ يَلَا قَ 17] نَع رِبَا جَ نَب دَبَعَ اللَّهُ، لَا قَوْلَ لَا

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “janganlah menikahkan wanita kecuali dengan yang sepadan, dan tidak boleh ada yang menikahkan mereka kecuali para wali, serta mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham”. (HR. Baihaqi)

Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirshy*.²⁰

Dari perbedaan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai batasan mahar ini. Selanjutnya, penulis akan mengkaji lebih khusus pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Penulis memilih Imam Hanafi dan Imam Syafi'i karena mengingat beliau adalah termasuk pendiri madzhab hukum Islam yang sangat terkenal di samping keahlian beliau sebagai ahli hadits dan sekaligus ahli fiqh yang kapabilitasnya tidak diragukan lagi.

¹⁸ Opik Taupik K, Ali Khosim Al-Mansyur, Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqh-Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015), hlm. 174

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 94.

²⁰ *Ibid* 174

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas didapat rumusan masalah sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Batasan Mahar dalam Perkawinan?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum Batasan Mahar Dalam Perkawinan?
3. Bagaimana Analisis Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Batasan Mahar Dalam Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang batasan mahar dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang batasan mahar dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang batasan mahar dalam perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditemukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian ini. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan yang telah menjadi salah satu perbedaan tentang jumlah mahar.
2. Mempermudah para pihak yang telah melaksanakan atau yang akan melaksanakan pernikahan.
3. Penulis dan penyimak skripsi ini dapat menginterpretasikan nilai-nilai positif yang ada pada skripsi ini dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah Agama rahmatan lil'alamiin dan bertoleransi yang tinggi, menghargai setiap perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindarkan, perbedaan adalah rahmat bagi kita untuk senantiasa saling menghargai satu sama lainnya.

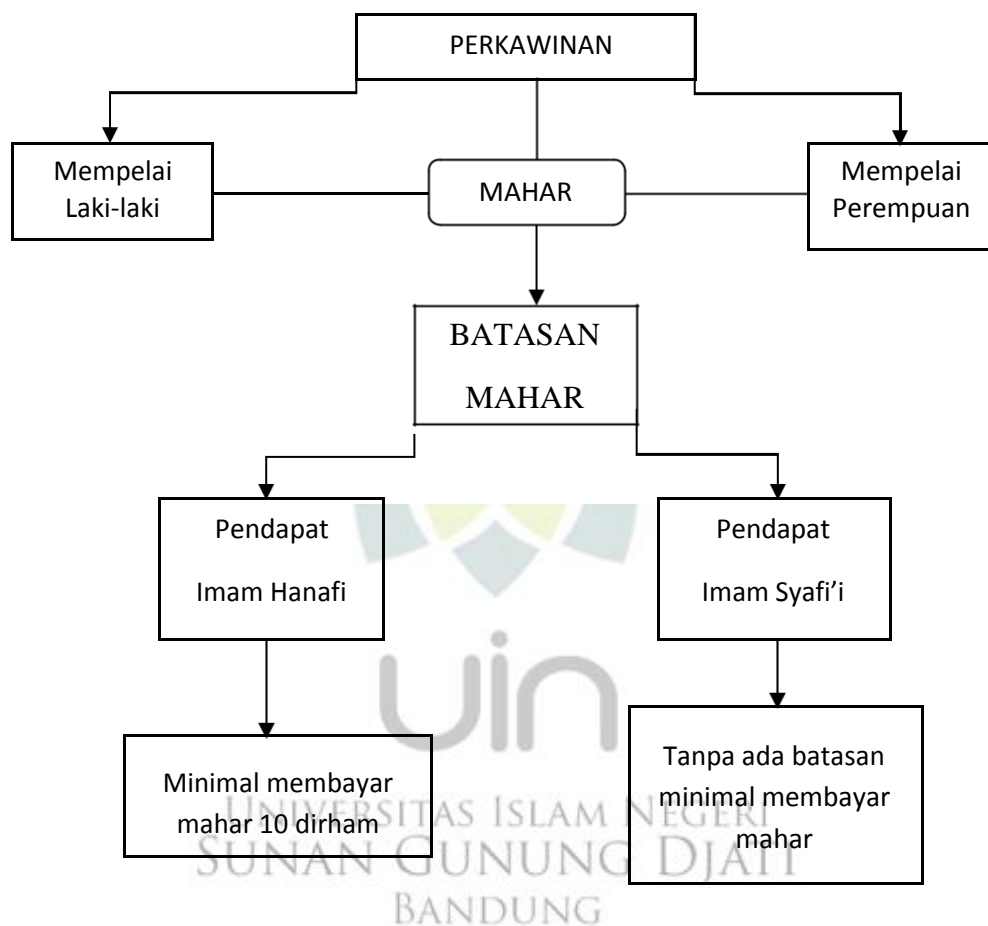
Perbedaan pendapat dalam Islam begitu banyak, terutama dalam bidang fiqh, baik fiqh muamalah, fiqh ibadah, fiqh akhwalul syakhsyah, fiqh jinayah dan sebagainya. Perbedaan pendapat dalam suatu hukum

merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena setiap orang memiliki pandangan tersendiri, setiap orang memiliki hak untuk berijtihad, dan inilah merupakan suatu ciri manusia yang selalu berfikir, tidak monoton dan manusia itu memiliki kehendak yang bebas, kehendak merupakan pemersatu kesadaran, pemersatu ide-ide dan pemikiran-pemikiran, serta mengikat dalam satu kesatuan yang harmonis, kehendak merupakan pusat organ berfikir.

Disamping itu kerangka pemikiran penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori *Muqaranatul Mazhabi* yaitu membandingkan dua pemikiran tokoh hukum Islam untuk dicari pendapat mana yang lebih kuat, disamping itu penulis juga menggunakan kaidah ushul fiqh *masalah mursalah* atau suatu perkara ditinjau dari segi kemaslahatannya dan kemadaratannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan juga untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i maka penulis menggunakan beberapa sistematis sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.²¹

Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok²². Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat Konstruktivisme, yang memandang kenyataan itu

²¹ Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 151.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PPSUPI dan PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 94.

berdimensi jamak, interaktif, dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Riset dimana dilakukan dengan jalan membaca buku-buku/majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan atau menjadikan bahan pustaka sebagai sumber.²³ Dimaksudkan untuk menggali teori – teori dan konsep-konsep yang telah ditelaah oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang ilmu yang akan diteliti, serta memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber data Primer dan data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama, sumber pokok, atau suatu data yang memberikan data langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.

²³ J.Supranto. *Metode Riset*. (Jakarta: Pt rineka cipta. 1997).hlm 13

Sumber-sumber primer yang akan penulis gunakan yaitu kitab Imam Hanafi. Serta kitab-kitab dari Imam Syafi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.

Adapun sumber-sumber yang digunakan adalah buku-buku serta jurnal yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode kualitatif dimana teknik dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumen, kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti *mengajar*. Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk²⁴ seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu *pertama*, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian *kedua*, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam

²⁴ Louis Gottschalk 1986. *Understanding History; A Primer of Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press), Hlm, 38.

pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, *non human resources*, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

a. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan dengan cara mengurai dan menjelaskan data yang di kumpulkan lalu kemudian di analisa. b. Metode Induktif

Yaitu penarikan kesimpulan umum dari data-data yang khusus, metode ini penulis gunakan pada bab IV dalam rangka menemukan landasan teori.²⁵

c. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk kesimpulan dan rumusan dengan melakukan perbandingan terhadap data-data yang di peroleh. Metode ini banyak digunakan dalam menganalisis data-data yang berkaitan dalam bab ketiga.



²⁵ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hlm.62